



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KISWANTANA
2. Jabatan : PANITERA MUDA KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
3. NHK : 431676

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 485.000.000

1. Tanah Seluas 864 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, WARISAN Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 561 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/400 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 90.000.000
5. Tanah Seluas 209 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 100.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. LAINNYA, MITSUBISHI --- Tahun 1989, WARISAN Rp. 70.000.000
3. MOBIL, SUZUKI CARRY MINIBUS Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 25.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 610.000.000



III. HUTANG

Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 510.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.